

Hamka dan Tafsir Harmonisasi Keislaman dan Keindonesiaan

DOI 10.18196/ALJIS.2018.0084.133-145

MUKHLIS RAHMANTO

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Judul : Adicerita HAMKA Visi Islam Sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern Terjemah dari edisi Inggris HAMKA'S Great Story A Master Writer's Vision of Islam for Modern Indonesia, Amerika: University of Wisconsin Press, 2016

Penulis : James R. Rush

Penerjemah : Zia Anshor

Penerbit : Gramedia

Kota : Jakarta

Tahun : 2017

Halaman : 321

ISBN : 978-602-03-6114-7

Di tengah memanasnya suasana politik sebagai efek kelanjutan pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2015 yang melahirkan gerakan 212, terdapat satu isu sensitif yang hingga kini masih ramai diperbincangkan oleh publik Indonesia yang mayoritas muslim. Isu tersebut sebenarnya punya genealogi yang kuat dimulai sejak pendirian republik ini. Isu itu tidak lain adalah mengenai hubungan antara agama, dalam hal ini khususnya Islam, dengan negara ini, Indonesia. Hal itu dimulai dan ditandai ketika debat mengenai dasar negara oleh para pemimpin awal bangsa pada tahun 1957 dalam Dewan Konstituante dengan topik khusus tentang Islam dan Pancasila dan dasar negara lainnya. Masing-masing pihak, baik golongan nasionalis (yang diwakili oleh partai-partai nasionalis seperti Partai Nasional, komunis, sosialis dan Kristen dan Katolik) maupun Islam (yang diwakili para pemimpin Masyumi, NU dan Sarekat Islam) mengajukan argumennya dan berakhir tanpa adanya kompromi antara kedua belah pihak. Hingga presiden Sukarno mengeluarkan dekrit Presiden tahun 1959

dimana salah satunya berisi kembali kepada UUD 45 dan pembubaran Dewan Konstituante. Meski akhirnya Pancasila tetap diterima semua pihak sebagai dasar negara, namun penerimaan itu masih menyisakan perasaan komunal (terutama kaum Islam). Perasaan tersebut timbul tenggelam seiring dengan berbagai macam peristiwa politik baik ketika masa Orde lama, Orde Baru di bawah Suharto, hingga pasca Reformasi 1998. Hamka dalam hal ini termasuk salah seorang yang mewakili golongan Islam dan berpidato panjang menjawab argumen dari golongan nasionalis.

Dalam konteks dunia global Islam, khususnya negara-negara dimana muslim sebagai mayoritas, diskusi mengenai hubungan antara agama dan negara pasca era modern masih menjadi "*trending topic*" dan selalu menjadi variabel dasar suatu peristiwa politik semisal *Arab Spring* pada tahun 2011 di kawasan Timur Tengah. Kaum Islamis dan nasionalis selalu berdialektika, berdebat, bahkan berkonflik tentang apakah simbolik-formalistik Islam ataukah Islam sebagai substansi kehidupan bernegara-bangsa yang patut dijadikan dasar negara. Meski demikian, terdapat juga negara yang akhirnya mampu mengharmonisasikan antara Islam dan nasionalisme.

Dialektika ideologis di atas, hemat penulis, menjadi latar belakang penting mengapa buku ini ditulis oleh James R Rush, seorang Indonesianis asal Amerika, yang dengan tekun melakukan riset khusus kurang lebih selama 34 tahun (1982-2016) mengenai sosok Hamka. Dia dengan meminjam teori sejarah Robert Berkhofer berpandangan bahwa Hamka adalah pencipta narasi besar (*great story*) untuk sebuah komunitas, dengan titik mayor lokusnya pada menjawab pertanyaan yang terus bergaung hingga kini dalam konteks Indonesia: Bagaimana menjadi orang Islam di suatu tanah air bernama Indonesia? Apa artinya menjadi menjadi seorang muslim? Apa artinya menjadi Indonesia? Titik minor lokus lainnya sangat beragam, karena Hamka adalah sosok ensiklopedis yang memiliki wawasan beragam latar belakang kajian-keilmuan (kebanyakan otodidak membaca), mulai dari sejarah dunia, sejarah Islam, filsafat, fikih, tasawuf, tafsir, dan sastra. Lokus-lokus kecil inilah yang kemudian dirangkai oleh Hamka untuk menyusun struktur adiceritanya.

Sebagai sebuah buku yang terbatas halamannya, James R. Rush dengan cermat mencoba memilih titik-titik kisar kehidupan intelektual, pribadi-keluarga, dan sosial kemasyarakatan ke dalam enam bab buku. Hemat penulis, jika ada kekurangan dari bab-bab di dalam buku ini, semuanya

ditutupi oleh kata pengantar edisi Indonesia dari Ahmad Syafii Ma'arif, yang jika diposisikan sebagai *insider* memberikan gambaran ideologis mendalam Hamka sebagai seorang Muslim.

Bab pertama James R Rush memilih diksi judul dengan "*Pedoman Masyarakat*" dikarenakan ini adalah salah satu majalah mingguan terkenal di Medan sebagai kota multikultur yang baru tumbuh dan membutuhkan banyak bacaan untuk warganya. Jadilah ia rumah kreatif Hamka untuk menuangkan gagasan-gagasannya dan untuk mengenalkan dirinya kepada publik Hindia Belanda. Hingga khalayak publik pun kemudian mengenalnya dan ia pun menjadi redaktornya. Dia sangat ingin menulis dan mengkontribusikan gagasannya untuk sebuah Indonesia baru yang akan lahir sehingga membutuhkan wawasan-wawasan yang dibutuhkan kepada publik untuk menguatkan alam pikiran mereka mengenai urgensi bangsa baru tersebut. Selain berisi reportase mengenai kilas balik dunia saat itu, seperti pergerakan tentara sekutu di Eropa menghadapi Nazi, yang terpenting karena dia mengikuti gerbong awal kebangkitan dan pembaharuan Islam, maka ia menegaskan dalam banyak tulisannya di *Pedoman Masyarakat*, bahwa Islam adalah agama yang sangat mendukung potensi akal manusia untuk mengimbangi zaman dan memperbaiki diri. Ia sangat berani untuk mengumandangkan anti-taklid atau dalam bahasanya menjadi anti "Pak Turut". Karena dunia Islam saat itu—dalam pandangan kaum muslim pembaharu—mengalami kemunduran akibat adagium pintu ijtihad telah tertutup dan hegemoni mazhab fikih dan kalam. Dan mendirikan sebuah bangsa yang merdeka adalah bagian dari mengimbangi zaman tersebut. Ia juga tertarik membahas mengenai filsafat kebahagiaan yang ia sarikan dari para pemikir besar Islam, mulai dari al-Ghazali hingga Ibnu Taimiyah. Artinya, ia mengenalkan tasawuf kepada publik Hindia Belanda saat itu, namun sebuah tasawuf yang ia kemudian hari merumuskannya menjadi "Tasawuf Modern". Sebentuk tasawuf yang dimanifestasikan oleh manusia modern, yang tidak terikat oleh sekat institusi formalistik bernama tarekat. Dan yang terpenting lewat *Pedoman Masyarakat*, Hamka yang seorang sastrawan melahirkan karya-karya sastra yang dimuat bersambung, di antaranya kemudian dibukukan menjadi *Di Bawah Lindungan Ka'bah* hingga *Merantau ke Deli*.

Bab kedua James R. Rush menarasikan cerita besar keduanya mengenai Hamka dengan judul "*Ayah dan Anak*". Hamka sendiri memberi judul bagian ini "*Ayahku*", yang berisikan mengenai biografi ayahnya, Haji Rasul.

Hamka menggambarkan peran ayahnya dalam kebangkitan Indonesia awal abad ke-20. Haji Rasul lebih dari sekedar ayah bagi Hamka. Melalui ayahnya, ia pertama kali berguru untuk mengenal Islam. Ayahnya adalah seorang ulama Minangkabau yang memulai dialektika antara kaum muda (pembaharu) dan kaum tua (tradisional). Hamka menggambarkan bahwa ayahnya adalah seorang yang keras dalam beragama yang memanifestasikan pembaharuan dengan diawali pemurnian praktik-praktik keberagamaan yang terkait dengan syirik dan penyimpangan agama, semisal mengkultuskan orang suci hingga berlebihan. Namun ketika Haji Rasul melawat ke Jawa dan bertemu dengan para tokoh gerakan Islam, khususnya Ahmad Dahlan yang sama-sama menginisiasi pembaharuan, pada tahun 1918 dia mentransformasi suraunya menjadi Sumatra Thawalib yang menurut Jeffrey Hadler—peneliti Hamka lain—menjadi sekolah reformis paling berpengaruh di dataran tinggi Minangkabau. Para alumni Sumatra Thawalib kemudian menjadi ujung tombak perjuangan dan pendirian Indonesia dengan mensintesisakan kecintaan tanah air dengan nasionalisme. Di luar itu, Hamka sebagaimana dikisahkan oleh James R. Rush, termasuk dekat dengan ayahnya dari sisi seorang ayahnya sebagai seorang ulama dan guru, bukan hubungan ayah dan anak yang semestinya penuh kasih sayang. Hal itu dikarenakan ayahnya berpoligami—sesuatu yang Hamka nanti akan sangat tidak setuju dengan menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam berprinsip pada monogami. Oleh karena itu, ia lebih dekat dengan ibunya, Safijah.

Bab ketiga James R. Rush memberi judul babnya “Hamka-san dan Bung Haji” dikarenakan mengisahkan titik kisar hidup Hamka di masa pergolakan Jepang. Dimana ia pernah dimusuhi oleh banyak orang karena kedekatannya (menjadi kolaborator dengan sebutan Hamka-san) dengan konsulat Jepang di Medan. Orang-orang yang memusuhinya terutama para sultan kerajaan di Sumatera bagian Timur yang meskipun sudah menyerahkan kedaulatannya ke Belanda dan kemudian Jepang, marah dikarenakan Hamka menyetujui Jepang untuk menghapus kerajaan-kerajaan kecil tersebut, dimana ia mengagitasikannya di hadapan publik. Ketika Jepang berhasil dipukul mundur Sekutu, ia pun tidak memiliki tameng. Di bab ini, James R. Rush juga menarasikannya dengan sebutan Bung Haji dimana ketika Indonesia mengalami revolusi kemerdekaan dengan beberapa pergolakan di dalamnya, Hamka pun sebagaimana kebanyakan orang bersuka cita menyambut kebebasan yang ia mulai berkontribusi

dengan diskursus mengenai negara Islam. Di halaman 101-108 inilah, buku ini mempunyai titik fokus pentingnya ketika James R. Rush menarasikan sikap Hamka terhadap "*Negara Islam*" yang juga menjadi judul bukunya yang terbit di Padang Panjang oleh penerbit Anwar Rasjid tahun 1946. Dimulai dari sisi sejarah Islam, Hamka menegaskan bahwa memang Nabi Muhammad memang mencipta negara Islam pertama di dunia. Tapi sebagai "muslim" kita juga harus bertindak (demikian ciri khas retorika Hamka yang mengkontekstualisasikan Islam dengan sejarah). Allah telah memberikan kita akal dan harus kita bertindak-pergunakan dalam momen revolusi untuk memperbaiki yang buruk di masyarakat dan membangun negara yang diimpikan: negara modern berdasarkan asas Islam, Indonesia muslim sejati.

Untuk membangun itu, sejarah politik Islam menurutnya tidak punya jawaban. Selama berabad-abad di negara-negara besar Islam masa lalu di bawah khalifah yang berkuasa penuh (pun turun-temurun kekuasaannya pada klan-keluarganya) dan para ulama yang berpikiran sempit menindas pemikiran bebas dan membuat umat memasuki zaman gelap-taklid. Sementara itu di Barat, akal manusia yang tak dikekang oleh agama membuat masyarakat Barat menemukan filsafat sosial baru, kemerdekaan baru dan akhirnya "demokrasi". Dan Hamka setuju bahwa konsep demokrasi terdapat akarnya dalam Islam ketika Nabi dan para sahabatnya mempraktikkan demokrasi, dimana setiap keputusan didasarkan pada musyawarah (*syura*). Nilai-nilai modern juga jika dicek akan banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti kesetaraan manusia, laki-laki dan perempuan, kebebasan dari tiran, kebebasan berbicara dan berpikir, dan keadilan sosial. Nabi sendiri tidak pernah menetapkan bentuk pemerintahan tertentu, termasuk kekhalifahan. Qur'an dan Nabi sendiri "memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk memilih bentuk pemerintahan menurut apa yang cocok dengan zamannya". Kekhalifahan baginya sudah menjadi masa lalu.

Indonesia merdeka menjadi negara modern berpenduduk mayoritas Islam dan berbentuk republik, dimana terkait dengan istilah "republik" Nabi memberikan contoh di saat khutbah *wada'* (perpisahan) akhirnya yang penuh dengan narasi dasar tentang demokrasi. Sesudah Nabi wafat, empat pemimpin-khalifah setelahnya dipilih secara musyawarah. Hamka kemudian menegaskan bahwa Islam mengajarkan zakat dan persaudaraan dan bahwa semua harta duniawi adalah milik Tuhan yang diberikan sebagai

berkah untuk umat manusia, yang artinya Islam di sini mendahului sosialisme dan komunisme modern. Sementara komunisme modern di Barat sibuk dengan konsep konflik antarkelas dan lepas dari rel kemanusiaan, “komunisme muslim” adalah komunisme sejati yang dipadukan dengan iman dan didasari rasa cinta persaudaraan dan kesetaraan semua orang di hadapan Allah. Maka Republik Indonesia seharusnya berbau dasar dari umat Islam sendiri sebagai pembangun negara, biarpun juga menggunakan pelajaran dari Barat. Indonesia tidak harus menjadi teokrasi (jawaban untuk Islamis lain ala Abu al-A’la al-Maududi dari Pakistan). Bagi Hamka urusan negara harus dipisah dengan urusan keagamaan. Dalam hal hukum, hanya urusan kehidupan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, kewarisan, dan semacamnya, yang harus diurus oleh pengadilan syariah, karena dalam urusan itu hukum Islam lebih unggul. Segala yang lain, dari penentuan kepemilikan, perselisihan bisnis, hingga kasus gangguan ketertiban, pencurian dan kejahatan tinggi-seharusnya disidangkan di pengadilan tinggi sekuler Departemen Kehakiman Indonesia. Urusan perang dan damai juga diserahkan pada negarawan, bukan ulama, karena para pemuka agama, terutama para ulama fikih tidak siap mengurus hal-hal demikian. Para ulama (hemat penulis yang dimaksud Hamka adalah ulama tradisional) tidak mengerti dengan pemerintahan demokratik. Ia juga menambahkan bahwa dalam republik, toleransi beragama harus ditonjolkan karena didukung banyak teks dalam Islam. Sesuatu yang nanti saat Hamka menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia, ia memberikan tafsir ulang, garis-garis batas, dan penekanan (bab keenam).

Selanjutnya, Hamka menyetujui naskah Undang-Undang 1945 dengan tidak mengangkat perkara Piagam Jakarta, yang menurutnya jika tidak dihapus dari naskah tersebut oleh Sukarno dan pemimpin senior lainnya, bakal mewajibkan Muslim Indonesia di bawah otoritas syariah. Dalam pamfletnya berjudul “*Islam dan Demokrasi*” yang terbit tahun 1946, Hamka memuji keras klausa yang memang dipakai para penyusun Undang-undang dasar negara Indonesia sebagai sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Baginya itulah dasar negara yang otentik. Meski Tuhan banyak nama, hanya ada satu Tuhan. Dengan unsur-unsur negara sekuler (hak asasi manusia dan ekumenisme) bukan berarti Indonesia tak dapat menjadi negara Islam. Semua itu tergantung pada umat kita. Pendek kata, jenis negara Islam yang Hamka inginkan bagi Indonesia adalah “masyarakat”

Muslim. Istilah lainnya adalah “negara Muslim”.

Hemat penulis inilah ijhtihad ulama modernis seperti Hamka, dikarenakan kalangan Islam modernislah yang dianggap mampu melayani dan berdiskursus dengan kalangan nasionalis mengenai hubungan antara agama dan negara (dan dasar negara) di tengah momen modernisasi yang melanda dunia pasca kolonialisme.

Bab keempat James R. Rush menempatkan puncak adicerita Hamka dengan judul bab “Islam untuk Indonesia” dengan konteks dari Jakarta. Dimana Hamka merantau pindah ke ibukota yang baru, beraktivitas di sana dan berharap lebih luas segmentasi pembaca gagasannya. Sehari-hari ia beraktivitas menjadi pejabat senior di Departemen Agama, anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah dimana kakak iparnya-Sutan Mansur-menjadi ketua umumnya (1953-1956), pergi ke kantor Masyumi, serta aktif berkhotbah. Selain itu ia tetap menulis dan kurang lebih antara tahun 1950-1952. ia banyak menerbitkan karyanya, mulai dari memoar *Ayahku*, memoarnya sendiri berjudul *Kenang-kenangan Hidup*, buku-buku kompilasi artikelnya di *Pedoman Masyarakat*, *Keadilan Sosial dalam Islam* dan *Falsafah Ideologi Islam* (banyak merujuk pada tulisan-tulisan baru di Mesir), *Perkembangan Tasawuf di Abad Kedua*, seri *Sejarah Umat Islam* (empat jilid), dan *Peribadi* (buku pengembangan diri singkat). Semua isi gagasan Hamka dalam karyanya tidak bisa lepas dari jenis Islam yang dirumuskan pada kebangkitan akhir abad ke-19 oleh Muhammad Abduh dan Jamaludin Al-Afghani, yang mengakui ikhtiar manusia dan membuka pintu ijhtihad selebar-lebarnya. Selain itu, ia juga mulai bepergian ke luar negeri. Ke Mekah untuk pergi haji yang kedua kali lalu menyambangi negara-negara Timur Tengah lain seperti Mesir dimana ia sangat terpengaruh oleh para cendekiawan kontemporer di sana seperti Ahmad Amin (tokoh yang tulisannya sangat mempengaruhi Hamka sehingga Hamka memilih hidup dengan “pena”), Abbas Aqqad, dan Muhammad Husein Haikal. Mesir sangat berarti bagi Hamka karena ayahnya yang terpengaruh gerakan kebangkitan Islam Muhammad Abduh, bacaan-bacaan dari Mesir membantu bahan-bahannya menulis dan referensi belajar otodidaknya, serta mengenal tulisan-tulisan Barat lewat para penulis Arab. Ia juga mengunjungi Amerika kurang lebih empat bulan dan sangat membekas refleksinya mengenai kehidupan Amerika yang menurutnya banyak kemakmuran dan kemajuan teknis (tata kota dll.) di sana-sini, termasuk pendidikan. Namun di sisi lain, masih terjadi ketakutan terhadap

komunisme, pergaulan bebas, dan rasisme. Memoar perjalanan ke Timur dan Barat tersebut ia tulis secara bersambung untuk pembaca Indonesia baru yang butuh wawasan global. Puncaknya pada tahun 1956, ia menulis *Pelajaran Agama Islam*, sebuah buku orisinal ajaran dasar Islam untuk orang Indonesia yang ditulis dalam pendekatan filosofis untuk menjelaskan rukun Iman dengan integrasi pendekatan antara rasionalis, sufistik, dan sunni.

Pada periode ini ia juga terjun ke politik lewat Masyumi (representasi Muslim modernis) dikarenakan kegagalan pemerintah Indonesia untuk melakukan konsolidasi-konsolidasi antar elemen bangsa (yang beda ideologi politik, etnis, atau agama). Kontestasi kekuasaan antara kelompok tentara yang tidak puas, Sukarno yang bermanuver dengan komunis dan didukung oleh nasionalis (PNI) serta NU. Apalagi ketika masa Demokrasi Terpimpin dimana Sukarno melangkahi Dewan Konstituante yang dianggap berlarut-larut lalu dibubarkan pada tahun 1959 melalui dekrit Presiden. Akhirnya Jenderal A.H Nasution mengusulkan agar kembali kepada UUD 1945 dengan tambahan piagam Jakarta, dengan kalimat yang mengandung kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, namun tertolak melalui pemungutan suara. Hamka menerimanya dengan rela hati dan mengatakan, "Semua yang menolak [pandangan kami] adalah saudara kami. Semuanya bangsa kami, kawan setanah air...Sang Merah Putih berkibar di atas kepala kita semua". Inilah bukti sintesa tafsir Hamka untuk tetap pada keislaman dan keindonesiaan. Hal itu sejalan dengan pemimpin Masyumi saat itu, Muhammad Natsir yang pada tahun 1949 menulis, "Dasar negara Islam secara umum bisa ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Republik". Sebelumnya, memang Masyumi banyak dipojokkan oleh sekutu Sukarno, terutama dari komunis sehingga Masyumi makin tergeser dari kekuasaan apalagi tiga pimpinannya Sjafrudin Prawiranegara dan Burhanudin Harahap, juga Natsir bergabung ke pemberontakan di Sumatera (PRRI). Tapi Hamka tak mendukung pemberontakan tersebut, meski menurutnya demokrasi telah gagal.

Dalam bab kelima, James R. Rush mengawali dengan cerita mengenai kehidupan keluarga Hamka di Jakarta, dimana ia menyewa rumah di kawasan Sawah Besar bersama istrinya, Siti Raham, dan tujuh anaknya. Rumah mereka terkenal karena keramahannya sehingga banyak tamu datang-pergi. Suatu sore dengan hanya mengenakan sarung dan kaus kutang ala Cina yang banyak tinggal di sekitar rumahnya, ia sibuk mengetik,

dan ia menerima Ghazali Sjahlan dan Abdulah Salim dari Yayasan Pesantren Islam Masjumi, yang memintanya menjadi takmir masjid yang akan dibangun di daerah Kebayoran Baru. Ia mengusulkan agar dibangun masjid yang bagus, luas, dan bisa digunakan sebagai sarana pendidikan hingga pada tahun 1956, Hamka pindah rumah ke samping kompleks masjid tersebut. Selesai dibangun pada 1959, Hamka kemudian didapuk menjadi imam besarnya. Pada saat yang bersamaan, ia mendapat doktor *honoris causa* dari Universitas Al-Azhar, Mesir, gelar yang sama dengan yang diberikan kepada ayahnya pada tahun 1926. Tahun berikutnya ia diangkat menjadi profesor tasawuf di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta dan mulailah ia menulis dengan nama Prof. Dr. Hamka. Tahun berikutnya, rektor Universitas Al-Azhar, Mahmud Syaltut datang ke Indonesia dan mengusulkan untuk member nama masjid itu dengan masjid Al-Azhar. Dari sinilah peran keumatan dan kebangsaan Hamka bertambah meluas. Dengan peran baru sebagai imam, ia merenung tidak puas dengan arah kehidupan masyarakat Indonesia yang dianggapnya menyimpang dan kekhawatirannya terhadap musuh umat Islam yang semakin membesar, utamanya komunis yang kembali menguat pasca pemberontakan 1948 dengan Sukarno sebagai tameng. Ketika Masyumi sudah terpuruk, dewan Konstituante telah bubar, dan Sukarno menjadi diktator, ia merasa terdapat perang budaya dimana umat harus diingatkan dan dipandu.

Maka masjid Al-Azhar menjadi pusat kebangkitan Muslim, pusat dakwah dan pembinaan masyarakat yang selama ini lalai karena umat Islam terkonsentrasi pada ranah politik dan parlemen. Di sana ia memberi kuliah Qur'an setelah subuh yang kemudian berkembang dengan kelas-kelas agama Islam lain. Masjid itu juga mendirikan lembaga pendidikan. Tapi yang utama adalah menerbitkan kembali sebuah majalah seperti *Pedoman Masyarakat*, yaitu *Panji Masyarakat*. Sebuah majalah yang bermisikan penyebar kebudayaan dan pengetahuan untuk perjuangan reformasi dan modernisasi Islam. Tentu saja pembaharuan Islam menjadi semangat utamanya selain artikel-artikel mengenai sejarah Islam, filsafat, peristiwa terkini di dunia Islam hingga rubrik populer lain dengan oplah mencapai 20.000 eksemplar dan tersebar ke penjuru Indonesia. Kontributornya mencakup para jurnalis dan intelektual modernis terkemuka di Indonesia. Beberapa diskursus penting adalah mengenai dinamika dan sejarah kebudayaan Indonesia serta Islam dan komunisme, termasuk

memuat artikel Mohammad Hatta, "Demokrasi Kita" yang mengkritik kepemimpinan saat itu yang cenderung tergelincir ke dalam kediktatoran sebagai hukum besi sejarah dunia. Marahlah Sukarno dengan esai tersebut dan kemudian Masyumi dibubarkan serta Panji Masyarakat dibredel. Namun di sisi lain, majalah dan koran komunis semakin membesar. Menghadapi itu Hamka tetap membina masjid dan jamaahnya semakin membesar. Dimulailah perang kebudayaan atau lebih dikenal dengan polemik kebudayaan.

Perang budaya antara komunis dengan kelompok Islam dimana yang disasar adalah Muhammadiyah dan Masyumi, yang dicap PKI sebagai kapitalis birokrat, rentenir dan tuan tanah yang kejam. Komunis yang terstruktur dalam Partai Komunis Indonesia menjadi basis suara Sukarno hingga Angkatan Darat pun terancam, dan dengan kekuatan Islam (Muhammadiyah, NU) dan agama lain (Partai Kristen, Katolik) membentuk sebuah persekutuan untuk menghadapi keadaan ini dengan berkoordinasi di Masjid Al-Azhar. Persekutuan antara Angkatan Darat (dikomandoi Henderal A.H Nasution) dan barisan Islam ini kemudian menerbitkan sebuah majalah bernama *Gema Islam* dengan misi untuk menangkis dan member jawaban terhadap agitasi budaya yang dilancarkan oleh PKI lewat organisasi budaya mereka, Lekra, yang sampai menyatakan, bahwa yang tidak turut serta dengan doktrinasi komunis, bukanlah rakyat. Dan terjadilah prahara itu, dimana banyak para pemimpin dan tokoh ditangkap penjarakan seperti Mohammad Roem, M. Natsir, Sjahrir dan banyak lainnya sehari setelah nomor pertama *Gema Islam* terbit. Lekra, lewat salah seorang anggotanya bernama Abdullah S.P yang menulis artikel di koran kiri *Bintang Timur*, menuduh Hamka melakukan plagiat, bahwa karyanya *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck* menjiplak novel *Magdalena* (Majdulin) karya novelis Mesir Mushthafa Luthfi al-Manfaluthi yang merupakan terjemahan dari karya Perancis abad ke-19 karya Alphonse Karr, *Sous les tilleuls* (Di bawah Pohon Linden). Tuduhan bertambah kuat dengan kritik pedas dari Pramodya Ananta Toer, penanggungjawab rubrik sastra *Bintang Timur*. Tuduhan ini dijawab oleh HB. Jassin bahwa ia memang sangat terpengaruh oleh Al-Manfaluthi. Namun biarlah komite sastra dari Universitas Indonesia yang melakukan penilaian dengan Hans Bague Jassin, Sang Paus Sastra Indonesia dan ketua bagian sastra Indonesia modern di lembaga budaya dan bahasa, sebagai penilai otoritatifnya. Dan setelah dilakukan penilaian, HB. Jassin menilai bahwa Hamka tidak melakukan plagiat, tapi adaptasi

yaitu pengubahan satu karya sastra asli ke latar zaman dan tempat berbeda dan mengubah nama dan tokoh sehingga sesuai dengan latar baru. HB. Jassin bisa bersikap *fair* dikarenakan dalam menilai ia meminta Hamka untuk menyerahkan naskah asli *Majdulin* karya Al-Manfaluthi dan kemudian diterjemahkan oleh rekannya. Setelah itu, terjemahan *Majdulin* disandingkan dengan *Tenggelamnya Kapal Van der Wijk*. Hamka tidak marah dan tidak terpancing dengan peristiwa itu dikarenakan orang-orang seperti Pramoedya A. Toer ingin Hamka berharap balik menyerang. Tapi kemudian di *Gema Islam* terbit artikel Muhammad Ali yang mendasarkan artikelnya pada informasi dari Kolonel H. AJ. Bustami, gubernur Kalimantan Selatan yang memprediksi bahwa PKI akan semakin berkuasa dengan diambil alih secara paksa beberapa tanah rakyat dari tuan besar dengan dalih kepemilikan umum. Beberapa pembisik PKI dalam lingkaran Sukarno pun berang.

Puncaknya Hamka ditangkap berdasar Penpres No. 11//1963 (penetapan Presiden tentang penangkapan orang yang dicurigai dan dituduh makar) pada 27 Januari 1964 siang hari kisaran pukul 11 saat sedang mengajar ibu-ibu. Ia tegaskan di hadapan penyidik, bahwa ia tidak mengikuti pertemuan rahasia yang ingin berbuat makar kepada pemerintah dengan bersekongkol dengan pemerintah Malaysia. Tapi rekan-rekannya difitnah dan disiksa, dipukuli, dan diestrum untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan dan demi keselamatan, akhirnya mereka, juga Hamka, terpaksa mengaku tuduhan palsu itu. Kurang lebih dua tahun setelah itu, Hamka baru bebas dari penjara yang berpindah-pindah tempat dengan yang terakhir dia pindahkan di Rumah Sakit Persahabatan sebagai tahanan karena dia mengalami sakit wasir kronis dan diabetes. Tapi kata Hamka, inilah rencana Allah yang memisahkan dengan keluarga dan jamaahnya untuk menyelesaikan karya *magnum opus*-nya Tafsir Al-Qur'an (hampir) 30 juz. Tafsir ini sudah ia mulai lakukan sejak kuliah subuh di Masjid Al-Azhar. Oleh karena itu, ia namai tafsir itu tafsir Al-Azhar yang kemudian nanti ia hadirkan ke pembaca publik lewat tafsir bersambung di *Panji Masyarakat*. Baru pada tahun 1981 ia dapat menerbitkannya secara utuh. Selama masa penahanannya, ia menghibur diri dengan kisah Ibnu Taimiyah yang hemat Hamka "jiwanya tidak dapat dibeli" meski harus mendekap di penjara Damaskus di bawah kekuasaan Dinasti Mamluk dikarenakan ia bersikap anti terhadap pemerintahan dinasti tersebut. Penahanannya membuat dia tidak terlibat dalam tahun-tahun akhir

kepemimpinan Sukarno dan peristiwa Gestapu. Setelah usai tahun kelam tersebut, ia memaafkan Sukarno dan menjadi imam shalat jenazah Sukarno. Kata Hamka, “Kita adalah bangsa pemaaf”.

Bab terakhir, James R. Rush tentu memberi judul bab dengan “Orde Baru” dimana Hamka menaruh harapan baru pasca tragedi Gestapu. Segera ia memulai rutinitas hidupnya, mulai dari ceramah, menulis, mengajar, mengasuh rubrik “*Dari Hati ke Hati*” di *Panji Masyarakat* dan menikmati royalti tulisannya, khususnya dari penerbit di Malaysia dimana buku-bukunya laris manis. Hidupnya bisa dikatakan lumayan dari sebelumnya dimana ia membeli sebuah mobil Holden dan jam merk Rolex yang dipakainya hingga meninggal. Tetapi pada tahun 1972, Siti Raham, istrinya meninggal karena penyakit komplikasi. Ia berduka dan sangat kehilangan dikarenakan Siti Raham-lah yang mengurus rumah tangganya dan para tamu yang kerap menyambangi rumahnya. Meski demikian ia tetap kritis terhadap Orde Baru yang menurutnya mulai otoriter dengan memberikan tafsir tunggal terhadap Pancasila dan cenderung anti-Islam. Pun kebudayaan Jawa terlalu dijadikan bahan standar nasionalisme yang ditafsirkan tunggal oleh Suharto lewat Orde Barunya. Sehingga ia menolak toleransi yang mengarah kepada sinkretisme dengan dasar Pancasila, dimana pada tahun 1968 perayaan Idul Fitri dan Natal disatukan oleh Pemerintah.

Di sisi lain, Orde Baru yang membawa suasana kondusif memberinya amanah sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebuah lembaga yang didirikan untuk mengakomodir urusan-urusan penting umat Islam dan mengeluarkan fatwa terkait halal-haram. Menteri Agama Mukti Ali memintanya menjadi ketua dengan alasan dialah jembatan umat Islam Indonesia, yang toleran dan jauh dari fanatisme, pun ia sering diundang di kalangan NU. Namun pada tahun 1981, masalah lama kembali terungkit, yaitu topik Muslim dan Natal dimana ia menegaskan kembali dalam sebuah khutbahnya, bahwa Natal adalah kepercayaan Kristen yang memperingati hari lahir anak Tuhan. Dan itu adalah akidah mereka dimana umat Islam tidak boleh menghadirinya dikarenakan akan tergolong musyrik. Fatwa MUI tentang larangan Muslim menghadiri perayaan Natal pun ditandatangani Hamka. Pemerintah Orde Baru pun kaget dan segera memecat salah seorang staf senior Hamka. Hamka kemudian diminta menarik kembali fatwa itu. Namun ia hanya menarik perihal penyebaran fatwa itu, isinya tetap berlaku. Krisis tersebut membuat Menteri Agama

hendak mengundurkan diri, namun Hamka-lah yang kemudian mengundurkan diri dari ketua umum MUI. Koleganya Mohammad Roem memberikan ucapan selamat dan mengakui ia (Hamka) mundur dalam kejayaan dikarenakan berani menantang pemerintah dan menjadi lambang kebebasan dan perlawanan.

Dalam kesimpulan bukunya, James R. Rush kembali mengutip Robert Berkhofer, bahwa Hamka adalah pembentuk adicerita bagi jutaan orang Indonesia, ia memberikan pemahaman tentang luasnya bentang sejarah dan menjelaskan takdir manusia itu sendiri. Dan tentu saja, pembentuk wacana muslim modernis Indonesia, dimana ia mewariskan narasi harmonisasi antara keislaman dan keindonesiaan. Narasi itu oleh kalangan kaum modernis Islam ditegaskan kembali pada tahun 2015 oleh Muhammadiyah-organisasi Islam yang ia ikuti dan tempat ia berkhidmat-dalam kredo Muktamarnya yang ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan, bahwa Indonesia adalah *darul-ahdi wa asy-syahadah*, negara yang disepakati dan dipersaksikan, untuk diisi dengan nilai-nilai keislaman sehingga terbentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, bukan terbentuk-wujudnya suatu negara Islam.